

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020		
Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.03.02 Biro Hukum Program : 4.06.4.06.03.16 Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan : 4.06.4.06.03.16.0026 Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Lokasi Kegiatan : BOYOLALI;KUDUS;KOTA SEMARANG;BREBES;Biro Hukum;DEMAK;WONOSOBO;KOTA SURAKARTA;KEBUMEN;SUKOHARJO;SUMATERA UTARA;BLORA;DKI JAKARTA;MAGELANG;SRAGEN;KOTA TEGAL;BANYUMAS;PATI;TEGAL;KOTA SALATIGA;BALI;JAWA BARAT;JAWA TIMUR;KENDAL;KLATEN;WONOGIRI;JEPARA;TEMANGGUNG;BANJARNEGARA;DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;PURBALINGGA;SEMARANG;KARANGANYAR;KOTA PEKALONGAN;GROBOGAN;KOTA MAGELANG;BATANG;PURWOREJO;PEKALONGAN;REMBANG;PEMALANG;CILACAP Jumlah Tahun 2019 : Rp 1.386.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) Jumlah Tahun 2020 : Rp 1.470.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) Jumlah Tahun 2021 : Rp 1.621.200.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)			

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	- Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	- 91.00 %
	- Persentase efektifitas produk hukum daerah	- 91.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Rp 1.470.000.000,00
Keluaran	- Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	- 15.00 Raperda
	- Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	- 110.00 Dokumen
Hasil	- Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	- 91.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan: Biro Hukum, 35 Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, Instansi Pusat		

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.470.000.000
5.2.1.	Belanja Pegawai				990.600.000
5.2.1.01.	Honorarium PNS				990.600.000
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				990.600.000
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				479.400.000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				13.543.000
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				13.543.000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				24.400.000
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				5.250.000
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				19.150.000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				53.690.000
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				53.690.000

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				357.767.000
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				105.100.000
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				252.667.000
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				30.000.000
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				30.000.000
Jumlah					1.470.000.000

Catatan :

Semarang,
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum

NIP. 197112071995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya	
2.	NOOR DIANA, SH	196711171989032011	Kasubbid Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.	NURWI MAYASRI FITRI ASTUTI, S.Sos , M.Si	197211051998032008	Perencana Ahli Madya	
4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
5.	ABDUL WAHAB, SE, MM	196203241984031004	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	ANGGIAN PURNAVERI, S.STP	198611292006021002	Pengadministrasi Keuangan	